

Manajemen Informasi dan Komunikasi

Oleh : Drs. H. A. Hamdan, M.M

Walikota Sukabumi H. Mokh. Muslih Abdusyukur, SH, M.Si, sering memberikan arahan kepada staf bahwa tata pemerintahan yang baik harus memenuhi kriteria seintific manajemen, sedangkan berbicara masalah manajemen itu bagaimana mensinergiskan antara fungsi manajemen dengan unsur manajemen, Oleh karena itu bagaiman pencitraan terhadap pemerintah sangat dipengaruhi oleh manajemen informasi dan komunikasi.

Dewasa ini yang sering menjadi kajian diberbagai media masa adalah; permasalahan KKN, Pengangguran, Pendidikan, Proses reformasi, Penegakan hukum dan Ham, Konflik-disintegrasi bansa, Kesehatan masyarakat, Bencana alam, Pelaksanaan Pilkada, Ancaman terorisme, illegal logging, illegal fishing, perdagangan wanita dan perlindungan anak..

Dari setumpuk permasalahan yang muncul diberbagai media massa sangat dipengaruhi pula oleh kondisi pelayanan informasi. Secara normatif telah ditemukan beberapa hambatan, diantaranya: Belum meratanya penyebaran informasi kebijakan pemerintah (informasi Publik), tidak semua unit memiliki satuan kerja yang khusus menangani penyediaan&penyebaran informasi publik, Peranan media belum dapat mengembangkan komunikasi dialogis secara intens dan optimal, lembaga pengawas media belum berfungsi secara optimal, terbatasnya ruang atau duration media untuk menyebarkan informasi publik, kapasitas dan kemampuan pengelola komunikasi dan informasi belum optimal (SDM), saran dan prasarana, manajemen.

Apabila pembaca rajin mengamati perkembangan dari karakteristik alur penyampaian informasi sebelum UU nomor 22 tahun 1999 dengan setelah lahirnya UU nomor 22 atau UU nomor 32 tahun 2004, terdapat perbedaan yang sangat kontras, bahkan pernah terungkap pada semiloka di Menpan tanggal 3 Agustus 2005 dikatakan oleh Pa Rukman dulu itu sulit melihat TV ata RRI yang tidak ada harmokokonya, sekarang ini sulit mendengar pemerintah di TV.

Mengapa pernyataan itu muncul, karena dulu Deppen itu sebagai leading sektor dan jubar pemerintah, bahkan selesai sidang kabinet Menpen memberikan keterangan pers, sekarang Depkominfo harus bermitra dengan departemen lain karena masing-masing departemen mempunyai kewenangan sebagai sumber, bahkan menkominfo hanya berfungsi sebagai fasilitator kegiatan jumpa pers.

Tempo dulu RRI dan TVRI menjadi media pemerintah melakukan siaran secara sentral, pihak swasta merelay, bahkan mudah dikendalikan, kini harus independen dan bernuansa pemberdayaan dan bermitra, dilain pihak kewenangan dan dana pemerintah terbatas, makanya khalayak lebih bersifat selektif.

Dengan berubahnya paradigma alur penyampaian informasi, maka sulit untuk melakukan sensor terhadap informasi yang masuk, bahkan tanpa disadari kini pihak masyarakat mudah terpropokasi oleh opini yang digulirkan, dan publik trus semakin tidak stabil, bisa-bisa menjadi keablasan dan menurunnya sikap nasionalis dan wawasan nusantara semakin rentan, disebabkan kebebasan pers tidak diimbangi dengan kecerdasan memilah dan memilih informasi dalam memperkokoh NKRI..

Kebebasan Pers tidak ditangkap sebagai peluang yang bisa memperkaya hksasanah penuangan ide dan gagasan yang konstruktif, malahan dijadikan alasan pembenar untuk baku hantam saling menghujat dan menyalahkan dengan mengedepankan pemunculan kelemahan orang lain, bahkan semakin kurangnya kepercayaan pengelola media terhadap tugas dan fungsi pemerintah dibidang humas. Di sisi lain pengelola media semakin mengarah kepada industri pers yang mengedepankan profit oriented.

Apabila kondisi tersebut tidak segera diperbaiki, maka kebijakan pemerintah tidak akan sampai kepada masyarakat, di pihak lain kesenjangan layanan informasi akan menghambat penyebaran informasi dari pusat ke daerah. Melalui manajemen informasi dan komunikasi yang efektif akan memnsinergikan pengelolaan dan penyebaran informasi melalui penyamaan persepsi tentang tugas dan fungsi institusi kehumasan.

Apa sebenarnya yang disinergikan dalam infomrai dan komunikasi, yaitu meliputi materinya,menkanismenya,pelayanaannya, SDM, Pengelolaan informasi termasuk di dalam pelayanan informasi kebijakan pemerintah pusat, daerah, penanganan masalah , setiap busolusinya bahkan aktivitas lain yang berhubungan dengan informasi

Layanan informasi bisa dilakukan melauai forum kehumasan, penerbitan, internet, siaran radio, fasimili, telephon, secara periodik, misalnya setiap minggu, setiap bulan,, striwulan, semester ataupun tahunan.

Demi terciptanya pencitraan positif diperlukan humas pemerintah yang mampu meningkatkan kelancaran arus informasi dari pemerintah kepada masyarakat dengan meningkatkan sinergitas dan koordinasi dalam pengelolaan komunikasi dan informasi untuk menyampaikan kebijakan serta membangun kemitraan. Saat ini telah dikeluarkan Keputusan Menteri Komunikadi dan Informatika nomo 100/Kep/M.Kominfo/11/2005 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah.

Dengan dibentuknya Bakohumas diharapkam bisa membantu pemerintah dalam melancarkan arus informasi antar lembaga pemerintah dan antar pemerintah dengan masyarakat, melalui kooordinasi dan kerjasama dan mrencanakan serta melaksanakan kegiatan kehumasan.

Secara rinci telah ditetapkan pula tata kerja badan koordinasi kehumasan pemerintah melalui SK Direktur Jenderal Sarana Komunikasi dan Diseminasi informasi nomor 01/Kep/DJ.SKDI/Kominfo/11/2005 dengan prinsip kesetaraan sebagai realisasi koordinasi dan kerjamasa dalam pelancaran arus informasi pemerintah.

Untuk kelancaran arus informasi dan penyelenggaraan pemerintah di daerah dan keterpaduan pelayanan informasi kepada masyarakat, pemerintah daerah dapat membentuk Bakohumas Daerah.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.